

## Dr. Hendri: Laut Bukan Halaman Belakang, Melainkan Beranda Strategis Indonesia

Updates. - KORLANTAS.ID

Sep 10, 2026 - 14:00



*Dr. Ir. Hendri, ST., MT Wartawan Utama Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)*

OPINI - Ketika pembangunan nasional dibicarakan, perhatian lebih sering diarahkan ke daratan. Jalan tol, kawasan industri, perumahan, pusat perdagangan, pertanian, dan kota-kota baru menjadi simbol kemajuan. Laut terkadang hanya muncul ketika terjadi konflik perbatasan, penangkapan ikan ilegal, kecelakaan kapal, penyelundupan, pencemaran, atau bencana pesisir.

Cara pandang seperti itu harus diubah. Bagi negara kepulauan, laut bukan ruang kosong yang memisahkan pulau-pulau. Laut adalah ruang yang menyatukan wilayah, menggerakkan perdagangan, menyediakan pangan, menyimpan energi, menopang kehidupan, serta menjadi arena pertahanan dan diplomasi. Laut bukan halaman belakang yang dibiarkan sepi. Laut adalah beranda strategis tempat bangsa ini berhadapan dengan dunia.

Di beranda itulah kapal dagang melintas, nelayan mencari nafkah, kekuatan asing menunjukkan kehadiran, kabel komunikasi dibentangkan, sumber energi dieksplorasi, dan kepentingan geopolitik dipertarungkan. Siapa yang mampu menguasai informasi, menjaga keamanan, membangun konektivitas, dan mengelola sumber daya laut akan memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan masa depannya.

Namun, kekayaan laut tidak otomatis menjadikan suatu negara sebagai kekuatan maritim. Keunggulan geografis baru bermakna apabila didukung oleh armada yang kuat, pelabuhan yang efisien, industri perkapalan, sumber daya manusia, riset kelautan, pengawasan, diplomasi, serta perlindungan ekosistem.

Bangsa ini memiliki laut yang luas, tetapi belum sepenuhnya berpikir, bekerja, dan membangun sebagai bangsa maritim.

## **Laut Adalah Identitas Konstitusional dan Geopolitik**

Badan Informasi Geospasial mencatat jumlah pulau yang telah memiliki nama dan koordinat resmi pada 2024 mencapai 17.380 pulau. Jumlah tersebut bertambah 63 pulau dibandingkan pencatatan sebelumnya ([ANTARA, 2024](#)).

Data tersebut bukan sekadar angka geografi. Setiap pulau membawa konsekuensi administrasi, pelayanan publik, pertahanan, pengelolaan sumber daya, konektivitas, dan penegasan wilayah. Sebuah pulau kecil di perbatasan dapat memiliki arti geopolitik yang jauh lebih besar daripada luas daratannya.

Pengakuan terhadap konsep negara kepulauan melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 merupakan hasil perjuangan diplomatik yang sangat penting. Melalui prinsip tersebut, perairan di antara pulau-pulau dipandang sebagai bagian yang menyatukan wilayah nasional, bukan sebagai pemisah.

Karena itu, cara melihat peta harus diubah. Pulau-pulau bukan titik daratan yang terpencar di tengah laut. Pulau dan laut merupakan satu kesatuan ruang hidup, ruang ekonomi, dan ruang pertahanan.

Posisi negeri ini juga berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta di antara benua Asia dan Australia. Di sekitarnya terdapat jalur pelayaran penting, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Jalur-jalur tersebut menghubungkan pusat produksi, energi, dan konsumsi dunia.

Kapal mengangkut sekitar 80 persen barang dalam perdagangan global.

Gangguan di Laut Merah, Terusan Suez, Laut Hitam, atau Terusan Panama telah memperlihatkan bahwa konflik dan hambatan pada jalur laut dapat meningkatkan biaya pengiriman, mengganggu pasokan energi dan pangan, serta mendorong inflasi di berbagai negara ([Associated Press, 2024](#)).

UN Trade and Development juga mencatat bahwa konflik, tarif, dan perubahan jalur pelayaran telah membuat perjalanan perdagangan laut semakin panjang. Rata-rata jarak pengangkutan meningkat dari 4.831 mil pada 2018 menjadi 5.245 mil pada 2024. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa jarak pelayaran tidak lagi hanya ditentukan oleh geografi, tetapi juga oleh geopolitik ([Reuters, 2025](#)).

Dalam keadaan dunia yang semakin tidak pasti, letak geografis merupakan modal sekaligus tanggung jawab. Jika dikelola dengan baik, posisi strategis dapat meningkatkan perdagangan, investasi, industri maritim, dan kekuatan diplomasi. Jika tidak dijaga, wilayah laut hanya akan menjadi jalur yang digunakan pihak lain tanpa memberikan manfaat optimal bagi rakyat.

## **Kedaulatan Tidak Cukup Digambar di Atas Peta**

Batas wilayah dapat dicantumkan pada peta, tetapi kedaulatan membutuhkan kehadiran nyata. Negara harus mampu mengetahui apa yang terjadi di laut, menegakkan hukum, melindungi pelayaran, membantu nelayan, menjaga pulau terluar, dan merespons ancaman secara cepat.

Kehadiran tersebut memerlukan kapal patroli, radar pantai, satelit, pesawat patroli maritim, sistem identifikasi kapal, pusat komando, pelabuhan pendukung, komunikasi aman, serta personel yang terlatih. Wilayah yang luas tidak mungkin diawasi hanya melalui patroli konvensional.

Pengawasan harus bergerak menuju kesadaran situasi maritim yang terpadu. Informasi dari radar, satelit, kapal, pelabuhan, nelayan, dan berbagai lembaga harus diolah dalam satu gambaran operasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Teknologi kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi pola pergerakan kapal yang tidak wajar, memprediksi daerah rawan penyelundupan, mengidentifikasi aktivitas penangkapan ikan ilegal, serta meningkatkan kecepatan respons. Namun, teknologi hanya berguna apabila tersedia data yang akurat, prosedur berbagi informasi, dan kejelasan kewenangan.

Pengamanan laut melibatkan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Perairan dan Udara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perhubungan, serta lembaga lainnya. Setiap institusi memiliki mandat yang penting, tetapi banyaknya lembaga dapat menimbulkan ruang koordinasi yang rumit apabila tidak didukung pembagian tugas dan sistem komando yang jelas.

Ancaman di laut pun semakin beragam. Bukan hanya pelanggaran wilayah dan penangkapan ikan ilegal, tetapi juga penyelundupan manusia, narkoba, senjata, pencurian sumber daya, perompakan, sabotase, pencemaran, serta serangan siber terhadap pelabuhan dan sistem navigasi.

Kabel komunikasi bawah laut, jaringan energi, terminal bahan bakar, dan pelabuhan merupakan infrastruktur strategis. Kerusakan atau serangan terhadap infrastruktur tersebut dapat mengganggu ekonomi, komunikasi, dan keamanan nasional.

Kedaulatan laut dengan demikian tidak dapat dibebankan hanya kepada kekuatan militer. Kedaulatan memerlukan pertahanan, penegakan hukum, teknologi, diplomasi, pelayanan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berjalan bersama.

## **Nelayan Harus Menjadi Tuan Rumah**

Ironis apabila negara yang memiliki wilayah laut luas justru membiarkan masyarakat pesisir hidup dalam kerentanan. Banyak nelayan kecil masih menghadapi keterbatasan permodalan, cuaca yang tidak menentu, harga bahan bakar, fasilitas penyimpanan, akses pasar, perlindungan sosial, dan posisi tawar yang lemah.

Nelayan sering menjadi pihak yang mengambil risiko paling besar, tetapi memperoleh bagian nilai ekonomi yang paling kecil. Mereka pergi melaut menghadapi gelombang, sementara harga hasil tangkapan lebih banyak ditentukan oleh rantai perdagangan yang panjang.

Pembangunan maritim tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan besar, pemilik kapal, investor kawasan pesisir, atau pengelola pelabuhan. Nelayan tradisional, pembudi daya, pekerja pengolahan ikan, perempuan pesisir, masyarakat adat, dan penduduk pulau-pulau kecil harus menjadi penerima manfaat utama.

Negara perlu memperkuat koperasi nelayan, menyediakan akses pembiayaan yang adil, memperbaiki tempat pelelangan ikan, membangun rantai dingin, memastikan ketersediaan bahan bakar, memperluas asuransi, serta menyediakan informasi cuaca dan daerah penangkapan.

Digitalisasi dapat membantu nelayan membaca prakiraan cuaca, mengetahui harga pasar, mencatat hasil tangkapan, dan mengakses pembiayaan. Namun, teknologi tidak boleh berhenti pada pembagian aplikasi. Nelayan membutuhkan perangkat, jaringan, pelatihan, dan pendampingan.

Kebijakan penangkapan ikan juga harus dibangun berdasarkan data ilmiah. Laut bukan gudang tanpa batas. Jika jumlah ikan yang diambil melebihi kemampuan pemulihan, keuntungan jangka pendek akan dibayar melalui hilangnya mata pencaharian pada masa depan.

Keadilan maritim berarti menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi, kelestarian sumber daya, dan hak masyarakat pesisir.

## **Laut sebagai Jalan Pemerataan Ekonomi**

Sebagai negara kepulauan, biaya logistik sangat menentukan pemerataan.

Harga barang di pulau terpencil dapat jauh lebih mahal bukan karena masyarakatnya mengonsumsi lebih banyak, tetapi karena transportasi, distribusi, pelabuhan, pergudangan, dan konektivitas belum efisien.

Kapal seharusnya menjadi penghubung utama antarpulau. Namun, konektivitas laut tidak cukup hanya dengan menyediakan rute. Kapal membutuhkan muatan yang seimbang, jadwal yang pasti, pelabuhan yang efisien, akses jalan, pergudangan, pusat distribusi, dan sistem informasi yang terintegrasi.

Jika kapal membawa barang konsumsi ke wilayah timur tetapi kembali tanpa muatan, biaya perjalanan pulang tetap harus dibayar. Karena itu, pembangunan konektivitas laut harus disertai pengembangan pusat produksi daerah.

Pulau-pulau tidak boleh hanya menjadi pasar barang dari kota besar. Setiap wilayah perlu didorong menghasilkan komoditas unggulan, produk perikanan, hasil pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang dapat dipasarkan melalui jalur laut.

Pelabuhan harus dipandang sebagai simpul pertumbuhan, bukan sekadar tempat kapal bersandar. Di sekitarnya perlu tumbuh industri pengolahan, jasa perbaikan kapal, pergudangan, logistik, kawasan perikanan, pendidikan vokasi, dan pusat perdagangan.

Industri galangan kapal nasional juga harus diperkuat. Negara kepulauan membutuhkan kapal niaga, kapal penumpang, kapal perintis, kapal patroli, kapal ikan, kapal riset, dan kapal pendukung energi. Ketergantungan yang terlalu besar kepada kapal, komponen, teknologi, dan perawatan dari luar negeri akan melemahkan kemandirian maritim.

Kebijakan belanja pemerintah dan badan usaha milik negara dapat diarahkan untuk memperbesar penggunaan produk dalam negeri, disertai peningkatan mutu, keselamatan, sertifikasi, dan kemampuan teknologi.

Laut dapat menjadi jalan pemerataan apabila konektivitas menghubungkan pusat ekonomi dengan wilayah yang selama ini berada di pinggir pembangunan.

## **Pangan, Energi, dan Industri Masa Depan**

Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan pangan, energi, air, dan lapangan kerja. Laut menyediakan peluang besar melalui perikanan tangkap yang terukur, budi daya, rumput laut, garam, bioteknologi, energi arus, gelombang, angin lepas pantai, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Namun, potensi tidak boleh berhenti sebagai daftar kekayaan. Komoditas laut harus diolah agar memberikan nilai tambah. Ikan tidak cukup dijual dalam bentuk mentah. Rumput laut tidak seharusnya hanya diekspor sebagai bahan baku. Garam nasional perlu ditingkatkan mutu dan produktivitasnya agar mampu memenuhi kebutuhan industri.

Perguruan tinggi dan lembaga riset harus menjadi pusat inovasi kelautan. Riset diperlukan untuk menemukan teknologi budi daya, pakan, pengolahan hasil laut,

obat-obatan berbasis biota, pemetaan sumber daya, kapal hemat energi, dan sistem pengawasan.

Sekolah vokasi maritim perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri. Lulusan harus menguasai navigasi, permesinan kapal, logistik, pengelasan, kelistrikan, keselamatan, teknologi informasi, pengolahan hasil laut, dan bahasa asing.

Pengembangan energi laut juga membutuhkan penelitian jangka panjang. Tidak semua teknologi langsung layak secara ekonomi. Namun, tanpa investasi riset sejak sekarang, negeri ini akan kembali menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan negara lain.

Laut adalah ruang industri masa depan. Akan tetapi, industrialisasi maritim harus dibangun dengan prinsip bahwa manfaat ekonomi harus lebih besar daripada kerusakan sosial dan ekologis yang ditimbulkan.

## **Jangan Menukar Laut Sehat dengan Pertumbuhan Sesaat**

Pembangunan pesisir sering menghadirkan pertentangan antara investasi dan lingkungan. Reklamasi, pertambangan, kawasan industri, pariwisata, pelabuhan, dan tambak dapat menghasilkan pendapatan serta pekerjaan. Namun, kegiatan tersebut juga dapat merusak mangrove, terumbu karang, padang lamun, wilayah tangkap, dan ruang hidup masyarakat.

Kerusakan laut tidak selalu terlihat seketika. Limbah yang dibuang hari ini dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Terumbu karang yang rusak memerlukan waktu panjang untuk pulih. Mangrove yang hilang membuat permukiman lebih rentan terhadap abrasi, gelombang ekstrem, dan kenaikan muka laut.

Sampah plastik dari daratan akhirnya bermuara ke laut. Karena itu, persoalan laut tidak dapat diselesaikan hanya di wilayah pesisir. Tata kelola sungai, limbah industri, sanitasi kota, pengelolaan sampah, pertanian, dan pertambangan turut menentukan kesehatan laut.

Pembangunan ekonomi biru seharusnya tidak dimaknai sebagai mengganti warna ekonomi dari hijau menjadi biru. Ekonomi biru harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya menghasilkan kesejahteraan tanpa menghancurkan kemampuan ekosistem untuk memperbarui dirinya.

Kawasan konservasi juga tidak boleh hanya menjadi garis pada peta. Perlindungan membutuhkan pengawasan, pendanaan, data, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat. Konservasi yang mengabaikan masyarakat pesisir dapat menimbulkan konflik. Sebaliknya, pemanfaatan tanpa pembatasan akan menghabiskan sumber daya.

Masyarakat adat dan komunitas pesisir memiliki pengetahuan tentang musim, arus, wilayah tangkap, dan tata kelola tradisional. Pengetahuan tersebut perlu diakui dan dipadukan dengan sains modern.

Laut yang sehat bukan hambatan pembangunan. Laut yang sehat adalah modal

produksi, perlindungan bencana, ketahanan pangan, dan sumber kehidupan jangka panjang.

## **Membangun Budaya Maritim sejak Pendidikan**

Masalah kelautan bukan hanya kekurangan kapal atau pelabuhan. Ada masalah cara berpikir. Selama laut dianggap sebagai daerah belakang, kebijakan akan terus berpusat pada daratan.

Pendidikan perlu memperkenalkan kembali identitas maritim kepada generasi muda. Anak-anak harus memahami bahwa sejarah bangsa ini dibentuk oleh pelayaran, perdagangan, kerajaan maritim, perjumpaan budaya, dan perjuangan menghubungkan kepulauan.

Literasi maritim tidak hanya berarti menghafal nama laut dan selat. Peserta didik perlu memahami ekosistem pesisir, keselamatan laut, perdagangan, hukum laut, teknologi kapal, geopolitik, cuaca, dan peran masyarakat nelayan.

Perguruan tinggi juga perlu memperkuat kolaborasi antara teknik, ekonomi, hukum, pertahanan, kelautan, komunikasi, dan ilmu lingkungan. Persoalan laut tidak dapat diselesaikan oleh satu disiplin.

Media memiliki peran penting. Pemberitaan laut jangan hanya ramai ketika kapal tenggelam, terjadi konflik, atau aparat menangkap pelaku kejahatan. Pers perlu mengawasi kebijakan maritim, kondisi nelayan, kesehatan ekosistem, pembangunan pelabuhan, keamanan wilayah, serta penggunaan anggaran.

Bangsa maritim harus memiliki kesadaran maritim dalam kehidupan sehari-hari.

## **Diplomasi Maritim untuk Menjaga Kepentingan Nasional**

Laut tidak mengenal batas ekologis yang sepenuhnya sama dengan batas politik. Pencemaran, migrasi ikan, perubahan iklim, kejahatan lintas negara, dan keselamatan pelayaran memerlukan kerja sama regional.

Pada saat yang sama, kerja sama tidak boleh mengurangi ketegasan dalam menjaga hak nasional. Di laut teritorial, negara memiliki kedaulatan sesuai hukum internasional. Di zona ekonomi eksklusif, negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya.

Perbedaan antara kedaulatan dan hak berdaulat harus dipahami agar pernyataan politik, tindakan aparat, serta diplomasi tidak menimbulkan kekeliruan hukum.

Diplomasi maritim perlu memperjuangkan penyelesaian batas wilayah, kebebasan navigasi sesuai hukum internasional, perlindungan nelayan, pemberantasan kejahatan lintas negara, penanggulangan pencemaran, dan tata kelola sumber daya yang berkelanjutan.

Forum ASEAN, kerja sama Samudra Hindia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan hubungan bilateral harus dimanfaatkan untuk memperkuat stabilitas kawasan.

Negeri ini tidak cukup hanya menjadi lokasi strategis. Negeri ini harus menjadi pembentuk aturan, pembangun kepercayaan, dan penjaga keseimbangan regional.

Kekuatan diplomasi akan lebih dipercaya apabila didukung kemampuan pengawasan, pertahanan, ekonomi, dan penegakan hukum di dalam negeri.

## **Agenda Menjadikan Laut sebagai Beranda Strategis**

Pertama, pembangunan nasional harus menggunakan perspektif negara kepulauan. Setiap kebijakan transportasi, energi, pangan, pertahanan, industri, pendidikan, dan lingkungan harus memperhitungkan karakter maritim.

Kedua, sistem pengawasan laut perlu diintegrasikan. Data radar, satelit, kapal, pelabuhan, dan masyarakat harus membentuk gambaran situasi bersama. Pembagian kewenangan antarinstansi harus jelas agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih.

Ketiga, kekuatan pertahanan laut harus dibangun berdasarkan kebutuhan wilayah dan perkembangan ancaman. Pengadaan kapal, pesawat, radar, rudal pertahanan pantai, sistem komunikasi, serta pangkalan harus diikuti kemampuan pemeliharaan dan industri nasional.

Keempat, pelabuhan dan angkutan laut perlu dikembangkan sebagai instrumen pemerataan. Keberhasilannya harus diukur dari penurunan biaya logistik, kestabilan harga, bertambahnya muatan balik, dan tumbuhnya produksi daerah.

Kelima, kesejahteraan nelayan harus ditempatkan sebagai ukuran utama. Modernisasi alat tangkap perlu disertai perlindungan sosial, akses pembiayaan, kepastian pasar, keselamatan, dan keberlanjutan sumber daya.

Keenam, industri perkapalan serta industri pengolahan hasil laut harus diperkuat. Kebijakan kandungan lokal perlu berjalan bersama penguasaan teknologi, peningkatan mutu, dan sertifikasi internasional.

Ketujuh, perlindungan ekosistem harus menjadi syarat investasi. Kajian lingkungan tidak boleh menjadi formalitas. Pelanggaran harus ditindak dan kerusakan harus dipulihkan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Kedelapan, riset kelautan perlu memperoleh anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Kapal riset, laboratorium, data oseanografi, teknologi pemantauan, dan peneliti harus diperlakukan sebagai infrastruktur kedaulatan.

Kesembilan, masyarakat pulau kecil dan pesisir harus memperoleh pelayanan dasar yang setara. Sekolah, fasilitas kesehatan, listrik, internet, air bersih, dan transportasi merupakan bentuk kehadiran negara.

Kesepuluh, diplomasi maritim harus lebih aktif. Bangsa ini perlu memimpin pembentukan kawasan yang damai, aman, terbuka, taat hukum, dan mampu menjaga sumber daya laut bersama.

# Menghadap ke Laut, Menatap Masa Depan

Ada pihak yang berpendapat bahwa pembangunan maritim membutuhkan biaya terlalu besar, sedangkan kebutuhan di daratan masih banyak. Argumentasi tersebut dapat dipahami. Namun, mempertentangkan pembangunan laut dan darat merupakan cara berpikir yang keliru bagi negara kepulauan.

Pelabuhan menghubungkan jalan darat. Kapal membawa pangan, obat, bahan bangunan, dan kebutuhan sekolah. Keamanan laut melindungi perdagangan. Ekosistem pesisir melindungi permukiman. Industri kapal menciptakan pekerjaan di daratan. Pembangunan laut dan darat saling menguatkan.

Ada pula dorongan untuk segera mengeksploitasi seluruh potensi laut demi pertumbuhan ekonomi. Namun, kekayaan yang diambil tanpa ilmu pengetahuan, tata kelola, dan pembatasan hanya akan menghasilkan keuntungan sementara serta kerusakan jangka panjang.

Laut tidak boleh dipandang sebagai ruang yang tersedia untuk dikuasai oleh siapa yang memiliki modal terbesar. Laut merupakan ruang kehidupan bersama yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat.

Masa depan [Indonesia](#) sangat ditentukan oleh kemampuannya menguasai dan merawat laut. Negara yang kehilangan kendali atas laut akan kehilangan keamanan, sumber daya, jalur perdagangan, dan pengaruh geopolitiknya.

Karena itu, sudah saatnya pembangunan nasional kembali menghadap ke laut. Bukan melalui slogan, melainkan melalui anggaran, pendidikan, industri, pertahanan, riset, diplomasi, serta keberpihakan kepada masyarakat pesisir.

Laut bukan ruang kosong di antara pulau-pulau. Laut adalah penghubung sejarah, sumber kehidupan, benteng kedaulatan, dan jalan menuju masa depan.

Bangsa yang menjadikan laut sebagai halaman belakang akan terus melihat kapal-kapal dunia berlalu membawa peluang. Bangsa yang menjadikannya beranda strategis akan berdiri percaya diri, menjaga rumahnya, menyambut kerja sama, dan menentukan arah perjalanannya sendiri.

Jakarta, 10 September 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT  
Wartawan Utama  
Ketua Umum Jurnalis Nasional [Indonesia](#) (JNI)